

sumber utama data kependudukan setiap satu kali dalam sepuluh tahun. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan sensus penduduk sudah 7 kali yakni pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, serta juga pada tahun 2020.

Adapun konsep yang digunakan pada SP2020, yang dimaksud penduduk di sini yaitu seluruh individu yang tinggal di suatu daerah atau wilayah dalam waktu 1 tahun atau lebih atau berdomisili di bawah 1 tahun namun memiliki tujuan tinggal lebih lama atau menetap. Ada beberapa indikator yang dapat dilihat dari kependudukan, yaitu diantaranya:

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Secara intinya faktor-faktor demografi mempengaruhi penambahan penduduk di suatu negara atau daerah.

Faktor ini, yaitu:

- 1) Kelahiran, merupakan peristiwa melahirkan dari seorang perempuan dengan anak yang terlahir hidup. Ini adalah istilah yang tidak berbeda dari *live birth* atau kelahiran hidup, yang merupakan lepasnya bayi dari rahim wanita dan memiliki tanda kehidupan.
- 2) Kematian, merupakan kondisi hilangnya tanda kehidupan secara permanen, dimana dialami sesudah kelahiran hidup dan dapat terjadi setiap waktu.
- 3) Migrasi termasuk tiga faktor yang memengaruhi jumlah penduduk. Selain itu, migrasi juga menyangkut ketidakmerataan distribusi dan kepadatan penduduk. Sehingga informasi tentang migrasi ini sangat diperlukan sebagai bahan masukan perencanan pembangunan seperti pemukiman serta transportasi.²

b. Kepadatan Penduduk

Secara ringkas kepadatan penduduk yaitu total penduduk persatuan luas. Ini digunakan untuk menjadi landasan dari kebijakan pemerataan penduduk dalam transmigrasi. CPD atau *crude population density* atau

² Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora: 1103013, “ Data Strategis Kabupaten Blora 2022”, 2022

kepadatan penduduk kasar memperlihatkan banyaknya penduduk per kilometer persegi luas wilayah. Data Strategis Kabupaten Bora 2022, luas wilayah di sini yaitu luas daratan secara keseluruhan pada wilayah administrasi.

c. Sex Ratio

Sex Ratio atau yang lebih dikenal dengan rasio jenis kelamin (RJK) yaitu suatu rasio atau perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan per seratus penduduk perempuan. Kegunaan dari data ini untuk mengembangkan perencanaan pembangunan berwawasan gender, khususnya terkait perimbangan pembangunan perempuan dan laki-laki secara adil.

Tabel 4.1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bora, 2022

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Desa & Kelurahan
1.	Jati	12	0	12
2.	Randublatung	16	2	18
3.	Kradenan	10	0	10
4.	Kedungtuban	17	0	17
5.	Cepu	11	6	17
6.	Sambong	10	0	10
7.	Jiken	11	0	11
8.	Bogorejo	14	0	14
9.	Jepon	24	1	5
10.	Bora	16	12	28
11.	Banjarejo	20	0	20
12.	Tunjungan	15	0	15
13.	Japah	18	0	18
14.	Ngawen	27	2	29
15.	Kunduran	25	1	26
16.	Todanan	25	0	25
Jumlah		271	24	295

Sumber: Peraturan Kepala BPS No. 1 Tanggal 5 Februari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 3 Tahun 2019 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2019.

Berlandaskan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022, luas wilayah Kabupaten Blora merupakan yang terluas ketiga di Jawa Tengah yang meliputi 16 kecamatan dengan Kecamatan Randublatung sebagai kecamatan terluasnya. Berlandaskan pada aturan yang sama, luas wilayah Kabupaten Blora merupakan yang terluas ketiga di Jawa Tengah yang meliputi 16 kecamatan dengan Kecamatan Randublatung sebagai kecamatan terluasnya.

Tabel 4.2 Jumlah, Persentase, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Blora, 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	%	Laju Pertumbuhan Penddk	Sex Ratio	Kepadatan (Jiwa/km ²)
1.	Jati	49.507	5,57	0,42	101,27	230
2.	Randublatung	77.687	8,75	0,03	99,41	329
3.	Kreadenan	41.163	4,63	0,14	100,19	367
4.	Cepu	76.530	8,62	0,12	98,21	1.561
5.	Sambong	27.970	3,15	0,64	100,19	272
6.	Jiken	38.415	4,32	0,06	99,45	232
7.	Bogorejo	24.834	2,80	0,07	99,52	408
8.	Jepon	63.040	7,10	0,20	101,55	529
9.	Blora	94.175	10,60	0,24	97,23	1.302
10.	Banjarejo	62.661	7,05	0,47	102	566
11.	Tunjungan	48.185	5,42	0,24	98,93	539
12.	Japah	35.392	3,98	0,13	99,7	274
13.	Ngawen	60.948	6,86	0,37	101,18	581
14.	Kunduran	66.443	7,48	0,22	100,66	533
15.	Todanan	63.696	7,17	0,60	101,56	409
16.	Kedungtuban	57.578	6,48	0,13	101,62	531
	Blora	888.224	100,00	0,25	100,07	454

Sumber: BPS Kabupaten Blora

Pada tahun 2022 jumlah penduduk di Kabupaten Blora berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu 888.224 jiwa dengan presentase 100,00%, dan Kecamatan Blora memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 94.176 jiwa. Jumlah laju pertumbuhan penduduk di 16 kecamatan tersebut yaitu 0,25 dengan Kecamatan Todanan memiliki

jumlah laju pertumbuhan penduduk tertinggi dibanding 15 kecamatan lain yang ada di Kabupaten Blora yaitu mencapai 0,60. Jumlah sex ratio yaitu 100,07 dengan Kecamatan Kedungtuban menjadi penyumbang sex ratio tertinggi yaitu mencapai 101,62. Terakhir yaitu jumlah kepadatan jiwa yaitu 454 dengan Kecamatan Blora mempunyai kepadatan jiwa tertinggi yaitu 1.302.³

2. Pemerintahan Kabupaten Blora

Kabupaten Blora saat ini dipimpin oleh seorang Bapak Bupati yaitu H.Arief Rohman, S.IP., M.Si. yang lahir pada tanggal 8 Maret 1980 . Beliau merupakan politikus yang kini merupakan Bupati Blora periode 2021-2026. Memiliki wakil bernama Tri Yuli Setyowati, S.T., M.M. kelahiran tanggal 19 Juli 1976. Beliau terpilih sebagai Wakil Bupati Blora mendampingi Bupati Arief Rohman pada pemilu tahun 2020.

Gambar 4.2

Bupati Blora H.Arief Rohman, S.IP., M.Si.



³ Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora: 1103013, “ Data Strategis Kabupaten Blora 2022”, 2022

Gambar 4.3
Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, S.T., M.M.



Sumber: Wikipedia Sumber: Wikipedia

3. **Visi Misi Kabupaten Blora**

a. **Visi:** “Terwujudnya Masyarakat Blora Yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat.”

b. **Misi :**

- 1) “Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter;
- 2) Mewujudkan Infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan;
- 3) Menciptakan birokrasi yang professional, progresif, bersih dan akuntabel;
- 4) Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif;
- 5) Memperkuat kerakyatan ekonomi berbasis potensi daerah dan membuka peluang Investasi untuk mengurangi kemiskinan.”

4. **Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Blora**

a. **Tingkat Pendidikan dan Kesehatan**

Ada banyak indikator yang dapat dilihat terkait dengan pendidikan, diantaranya seperti APM, APK, APS, dan lain sebagainya. Berikut adalah penjelasannya:

- 1) Angka Partisipasi Murni (APM), ini merupakan rasio antara siswa usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu dengan penduduk usia sesuai (dalam persentase).
- 2) Angka Partisipasi Kasar (APK), ini merupakan rasio banyaknya siswa dan usia yang sekolah di suatu tingkat pendidikan terhadap populasi penduduk kelompok usia yang sesuai jenjang pendidikan tertentu.
- 3) Angka Partisipasi Sekolah (APS), ini adalah proporsi anak sekolah pada usia tingkat pendidikan tertentu dalam kelompok usia sesuai jejang pendidikan terkait. Selain pendidikan, indikator kesehatan juga penting dalam perencanaan pembangunan. Indikator kesehatan yang sering menjadi bahan pertimbangan di antaranya yaitu tentang angka kesakitan. Angka kesakitan dihitung dari banyaknya penduduk dengan keluhan kesehatan dan Data Strategis Kabupaten Blora 2022 28 terganggunya aktifitas dibagi dengan jumlah penduduk. Keluhan kesehatan yang dimaksud di sini yaitu gangguan kondisi jiwa ataupun fisik dikarenakan kecelakaan atau lainnya yang mengganggu keseharian. Keluhan kesehatan yang kerap dialami penduduk secara umum yaitu sakit kepala, panas, sakit gigi, sesak nafas/asma, diare, pilek, dan batuk. Penderita penyakit kronis dinilai memiliki keluhan kesehatan meskipun penyakitnya tidak kambuh sewaktu survei (sebulan terakhir).⁴

⁴ Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora: 1103013, “ Data Strategis Kabupaten Blora 2022”, 2022

Tabel 4.3
Angka Melek Huruf di Kabupaten Blora
2010-2022

No.	Tahun		
1.	2010	83,19	89,95
2.	2011	85,6	90,34
3.	2012	85,6	90,45
4.	2013	85,46	91,71
5.	2014	89,42	92,98
6.	2015	86,97	93,12
7.	2016	88,73	93,30
8.	2017	87,33	93,39
9.	2018	88,30	93,45
10.	2019	87,97	93,54
11.	2020	87,42	93,62
12.	2021	88,49	93,79
13.	2022	88,30	94,26

Sumber: BPS Kabupaten Blora

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia di atas 15 tahun dengan kemampuan menulis dan membaca huruf latin dan lainnya, tanpa mengerti apa yang ditulis atau dibacanya terhadap penduduk usia di atas 15 tahun. Berdasarkan tabel diatas, angka melek huruf di Kabupaten Blora periode 2010-2022 angkanya selalu naik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa angka melek huruf di Kabupaten Blora mempunyai progres yang baik.⁵

⁵ Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora: 1103013, “ Data Strategis Kabupaten Blora 2022”, 2022

**Tabel 4.4 Angka Kesakitan di Kabupaten Blora
Tahun 2010-2022**

No.	Tahun		
1.	2010	27,30	28,72
2.	2011	56,761 ¹	48,31 ¹
3.	2012	15,44	14,94
4.	2013	14,80	14,52
5.	2014	16,28	14,67
6.	2015	18,84	18,12
7.	2016	59,41 ¹	49,77 ¹
8.	2017	43,69 ¹	48,94 ¹
9.	2018	16,54	15,15
10.	2019	24,91	16,88
11.	2020	24,00	16,86
12.	2021	13,92	16,84
13.	2022	16,28	14,60

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Keterangan: ¹Proporsi penduduk yang terganggu aktivitasnya terhadap penduduk yang mengalami keluhan Kesehatan sebulan terakhir

Kesakitan atau yang disebut morbiditas yaitu indikator untuk menilai tingkat kesehatan penduduk. Morbiditas yang semakin tinggi akan memperlihatkan bahwa semakin buruk derajat kesehatan penduduk. Kebalikannya, akan semakin baik derajat kesehatan penduduk jika morbiditas semakin rendah. Selain itu, morbiditas sendiri merupakan keadaan seorang individu dinyatakan sakit jika merasakan keluhan kesehatan yang mengganggu kesehariannya, di antaranya tidak bisa mengurus rumah tangga, bekerja, serta sebagainya selayaknya kondisi normal biasanya.⁶ Berdasarkan tabel diatas, angka kesakitan di

⁶ Megawati* , Bahriddin Abapihi, Irma Yahya, Ruslan, Lilis Laome, Mukhsar Program Studi S1 Statistika Fmipa Universitas Halu Oleo. "Pemodelan Angka Morbiditas Dengan Menggunakan Regresi Nonparametrik Spline Di Indonesia",2022.

Kabupaten Blora dari tahun 2010-2022 tidak menentu karena mengalami fase naik turun.

b. Perumahan

Luas lantai didefinisikan sebagai luas lantai yang digunakan dan ditempati untuk kebutuhan hidup sehari-hari (atap rumah saja). Sumber air minum bersih yaitu meliputi air isi ulang, air kemasan, leding serta [(pompa/ sumur bor, mata air terlindung dan sumur terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan tinja/limbah/kotoran paling dekat ≥ 10 m. Akses air minum layak yaitu apabila air hujan, air terlindungi, dan leding digunakan sebagai sumber air minum utama rumah tangga. Air terlindungi ini terdiri dari mata air terlindungi, pompa/sumur bor, dan sumur terlindung. Untuk rumah tangga dengan sumber air kemasan sebagai air minumannya, maka ini dimasukkan ke dalam akses air minum layak apabila air untuk cuci dan mandi ini bersumber dari air hujan, mata air terlindung, sumur terlindung, pompa/sumur bor, dan leding.⁷

Tabel 4.5 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak dan Sanitasi Layak di Kabupaten Blora, 2015-2022

Tahun	Sumber Air Minum Layak	Sanitasi Layak
2015	79,99	68,46
2016	86,99	70,44
2017	78,08	71,48
2018	77,73	77,08
2019	92,24	83,49
2020	92,41	87,46
2021	94,84	90,51
2022	93,39	91,52

Sumber : BPS Kabupaten Blora

⁷Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora: 1103013, “ Data Strategis Kabupaten Blora 2022”, 2022

Catatan : ¹ metode baru tidak memperhitungkan jarak ke tangki septik untuk sumur pompa, sumur dan mata air terlindungi

Adanya air bersih adalah hal yang vital untuk masyarakat. Hal ini dikarenakan kegunaannya yang beragam, seperti untuk memasak, pembangkit listrik, mandi, dan mencuci. Air digunakan pula untuk dikonsumsi, oleh karena itu perlu memperhatikan kualitas air. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416/MENKES/IX/1990 diterangkan bahwasanya yang dimaksud air bersih yaitu air untuk keseharian dengan kualitas sesuai syarat kesejahteraan untuk diminum. Ini adalah sumber kehidupan untuk masing-masing individu dan juga anugerah yang wajib disyukuri, sehingga ada kewajiban bagi seluruh individu untuk menjaga kelestarian air, baik kualitas ataupun kuantitasnya. Maka dari hal tersebut, masyarakat dituntut untuk mempunyai kesadaran untuk aktif berperan dalam melestarikan kualitas air.

Ciri dari air bersih yaitu rasanya tawar, tampilannya jernih, tidak berbau, dan tidak berwarna. Air penting untuk kehidupan banyak orang, sehingga pemerintah terdorong untuk membentuk suatu program pemenuhan kebutuhan air minum di pedesaan dan pinggiran kota melalui PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) bernama PAMSIMAS. Mengacu pada aturan tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum yang termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, diterangkan dengan jelas bahwasanya PDAM yaitu perusahaan milik daerah dan/atau kabupaten atau provinsi. Sementara definisi dari PDAM menurut yaitu perusahaan satu-satunya yang memonopoli produksi air minum berskala besar. Maka dari hal tersebut, perlu bagi perusahaan ini

untuk memaksimalkan kinerja supaya kualitas air yang diproduksi sesuai harapan pelanggan.⁸

Sanitasi yaitu upaya memantau faktor lingkungan yang kemungkinan adalah mata rantai untuk proses penularan penyakit. Sementara sanitasi menurut penjelasan dari WHO yaitu pemantauan faktor-faktor lingkungan fisik yang berpengaruh terhadap manusia, khususnya yang berpengaruh pada kelangsungan kehidupan, kesehatan, dan perkembangan fisik. Berdasarkan tabel diatas, presentase rumah tangga dengan akses air minum layak di Kabupaten Blora pada tahun 2015-2022 cukup mengalami peningkatan yaitu dari 79,99 di tahun 2015 menjadi 93,39 di tahun 2022. Begitu juga dengan sanitasi yang layak di Kabupaten Blora pada tahun 2015-2022 juga cukup mengalami peningkatan, dari presentase 68,46 di tahun 2015 menjadi 91,52 di tahun 2022.⁹

c. Kemiskinan

Definisi dari kemiskinan yaitu ketidakmampuan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup minimal, baik kebutuhan pangan atau nonpangan. BPS mempergunakan *basic needs approach* atau konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dalam mengukur kemiskinan. Ini adalah konsep yang mengarah kepada Handbook on Poverty and Inequality terbitan Worldbank. Melalui penggunaan pendekatan ini, maka kemiskinan dinilai dengan sebutan ketidakmampuan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar pangan dan nonpangan dan diukur berdasarkan pengeluaran. Penduduk miskin yaitu apabila pengeluaran per kapita per

⁸ Astuti, N. (2014). Penyediaan Air Bersih Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Sangatta Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Administrasi Negara*. 3(2).

⁹ Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora: 1103013, "Data Strategis Kabupaten Blora 2022", 2022

bulannya memiliki rata-rata dibawah garis kemiskinan.¹⁰

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, 2005-2022 (dalam ribu jiwa)

Tahun	Presentase	
2005	177,10	6.533,50
2006	197,60	7.100,60
2007	176,80	6.557,20
2008	155,06	6.122,60
2009	145,95	5.655,40
2010	135,00	5.218,70
2011	134,90	5.256,00
2012	127,10	4.952,06
2013	123,30	4.811,34
2014	115,98	4.561,83
2015	115,05	4.577,04
2016	113,94	4.506,89
2017	111,88	4.450,72
2018	102,50	3.897,20
2019	97,86	3.743,23
2020	103,73	3.980,90
2021	107,05	4.109,75
2022	99,83	3.831,44

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Berlandaskan data tersebut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blora pada tahun 2005-2022 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2005 mencapai angka 6.33,50 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan pada angka 3.831,44. Puncak tertinggi kasus kemiskinan di Kabupaten Blora yaitu pada tahun 2007 dengan angka 7.100,60 dan angka terendah yaitu pada tahun 2022 dengan angka 3.831,44.

¹⁰ Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora: 1103013, “ Data Strategis Kabupaten Blora 2022”, 2022

B. Gambaran Umum Kasus Stunting di Kabupaten Blora

Prevelensi balita stunting di Kabupaten Blora berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (RisKesdes) tahun 2013 sebesar 37,6% dan mengalami penurunan menjadi 30,8% ditahun 2018. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 prevelensi stunting menunjukkan peningkatan dari 21,5% ditahun 2021 menjadi 25,8% ditahun 2022. Sementara itu, prevelensi penurunan stunting Kabupaten Blora tahun 2022 menurut aplikasi elektronik –Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) sebesar 7,7% dengan jumlah balita sebanyak 3.581 balita. Capaian tersebut turun dari tahun sebelumnya yaitu 9,23%.¹¹

**Tabel 4.7 Prevelensi Stunting Kabupaten Blora
Tahun 2021-2022
Berdasarkan SSGI**

Kategori	2021	2022
Stunting	21,5	25,8
Berat Badan Kurang	16,1	21,7
Gizi Buruk	6,5	8,1

Sumber: Buku Saku SSGI, 2021&2022

Berdasarkan tabel di atas, prevelensi kasus stunting di Kabupaten Blora pada tahun 2021-2022 yaitu, pada tahun 2021 kasus stunting di angka 21,5 dan naik di tahun 2022 yaitu mencapai angka 25,8. Berat badan kurang pada 2021 yaitu mencapai pada angka 16,1 serta mengalami kenaikan pada 2022 di angka 21,7. Gizi buruk juga mengalami peningkatan pada tahun 2021 di angka 6,5 dan naik menjadi 8,1 di tahun 2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prevelensi stunting di Kabupaten Blora yang mencakup berat badan kurang dan juga gizi buruk pada tahun 2021- 2022 cenderung mengalami peningkatan.

11

<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/19/7d87599450712cf4bab879f2/Laporan-Indeks-Khusus-Penanganan-Stunting-Kabupaten-Kota-2021-2022.html>

Tabel 4.8 Prevelensi Stunting Kabupaten Blora Tahun 2020-2022

Berdasarkan E-PPGBM

Tahun	Jumlah Stunting	Presentase Stunting
2020	6.410	14,96
2021	4.172	9,23
2022	3.581	7,70

Sumber: E-PPGBM

Berdasarkan tabel di atas, menurut aplikasi E-PPGBM presentase kasus stunting pada tahun 2020 – 2022 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2020 sebanyak 14,96 turun di tahun 2021 menjadi 9,23, kemudian turun lagi di tahun 2022 menjadi 7,70 dengan jumlah balita sebanyak 3.581 balita. Jumlah kasus stunting juga selaras mengalami penurunan dari tahun 2020 mencapai 6.410 menjadi 3.581 di tahun 2022.¹²

Pada tahun 2023 sendiri, menurut data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Blora mencapai 21,2%. Presentase tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2022, dimana prevalensi stunting Kabupaten Blora mencapai 25,83%. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora optimis di tahun 2024 ini prevelensi stunting bisa turun hingga angka 14 persen. Bahkan Dinas Kesehatan Blora menargetkan Kabupaten Blora terbebas dari zero new stunting (tidak ada kasus baru stunting) di 2024.

C. Deskripsi Data Penelitian

1. Pemberdayaan Kolaboratif Masyarakat dan Pemerintah Derah Kabupaten Blora Dalam Mengurangi Angka Stunting di tahun 2022-2023

Pemberdayaan yaitu suatu proses pembangunan di mana terdapat inisiatif dari masyarakat untuk memulai kegiatan sosial dalam rangka memperbaiki kondisi dan situasi dalam diri sendiri.¹³ Dalam mengurangi angka stunting yang sedang menjadi permasalahan bersama, muncullah pemberdayaan masyarakat yang berkolaborasi

¹²<https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/4393/konvergensi-penurunan-stunting-di-blora-dinilai-tim-provinsi>

¹³<https://dosenppkn.com/pemberdayaan/>

dengan pemerintah daerah. Khususnya di Kabupaten Blora, masyarakat dan pemerintah bekerja sama guna mengurangi angka stunting yang sedang marak dibicarakan hingga saat ini. Hal ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting di tahun 2024 yaitu pada target 14% yang sebenarnya ini merupakan target tahun 2023 tapi belum bisa terealisasi atau gagal. Namun masyarakat serta pemerintah daerah tidak putus asa dan terus mencoba hingga penurunan stunting di Kabupaten Blora ini mencapai 14%.¹⁴

Pemberdayaan kolaboratif merupakan pemberdayaan yang dilakukan dengan cara bekerjasama dari kedua belah pihak atau lebih dan bertujuan supaya suatu pekerjaan atau permasalahan bisa segera diatasi.¹⁵ Pemberdayaan kolaboratif antara masyarakat dengan pemerintah daerah Kabupaten Blora bertujuan supaya masalah stunting ini bisa segera menurun. Karena masalah stunting ini merupakan masalah bersama dan juga masalah yang sensitive bagi sebagian orang terutama bagi orang tua atau anggota keluarga yang anaknya mengalami stunting, maka dari hal tersebut perlu kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam mengatasi hal tersebut.

Pemberdayaan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Blora ini juga sudah berlangsung dengan adanya salah satu kegiatan yaitu kegiatan Rembug Stunting yang diadakan tepatnya pada tahun 2022. Rembug stunting di tingkat Kabupaten bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora dihadiri 656 peserta terdiri dari unsur Pimpinan Daerah, OPD, Puskesmas, Ketua TPPS Kecamatan, Ketua TPPS Desa/Kelurahan. Di tingkat Kecamatan, Rembug Stunting di tingkat Kecamatan diadakan di 16 kecamatan yang ada di Blora, dan Rembug Stunting tingkat Desa/Kelurahan diadakan di 104 Desa/Kelurahan. Ada juga kegiatan Pembinaan Pelaku Penurunan Stunting Tingkat Desa/Kelurahan

¹⁴ Lalu Kekah Budi Prasetya, Tantangan Menuju Prevelensi Stunting 14%: Mengapa Penurunan Prevelensi Stunting Dalam 2 Tahun Terakhir (Tahun 2021 Dan 2022) Sangat Kecil Di Indonesia?“, Jurnal Keluarga Berencana, 2024.

¹⁵ <https://Serupa.Id/Kolaborasi-Pengertian-Indikator-Cara-Meningkatkannya/>

antara lain yaitu: Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan juga Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).¹⁶

Gambar 4.4 Acara Rembug Stunting PemKab Blora



Sumber:

<https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/4487/hari-keluarga-nasional-2022--pemkab-blora-gelar-rembug-stunting>

Pemberdayaan Masyarakat Maupun Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Angka Stunting di Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

Pertama, pemberdayaan pemerintah daerah Kabupaten Blora dalam mengurangi angka stunting yang dilakukan oleh BAPPEDA, adalah sebagai berikut:

a. Hak

1) Anggaran yang tersedia

Kaitannya dengan hal ini Bappeda mempergunakan anggaran yang tersedia dari pusat kepada Tim KPPS daerah dalam rangka menangani Stunting di setiap daerah. Seperti dana APBD dan juga Dana Alokasi Khusus (DAK)

¹⁶ <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/4487/hari-keluarga-nasional-2022--pemkab-blora-gelar-rembug-stunting>

- 2) Pegawai dan penyuluh yang ada di lapangan
Penyuluh lapangan ataupun pegawai dalam proses menangani stunting sudah diatur lewat Perpres 72 tahun 2021, di mana terdapat koordinasi yang dilakukan pemerintah pusat dengan daerah untuk membentuk tim KPPS serta sekretariatnya di bappeda. Nantinya tim ini akan melakukan koordinasi dengan OPD terkait secara keseluruhan untuk menurunkan Stunting di Kabupaten Blora.
- 3) Sarana dan prasarana yang tersedia
Sarana untuk mempercepat angka penurunan stunting ini antara lain dengan penggunaan sistem aplikasi online e-PPGBM (pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat). Pelaksanaan ini sangat krusial dalam rangka memenuhi informasi status gizi berdasarkan individu. Selain itu, ini adalah aplikasi berupa sistem pencatatan and pelaporan gizi anak berbasis masyarakat guna memperoleh pendataan yang akurat dan cepat. KPM atau Kader Pembangunan Manusia dalam hal ini adalah pihak yang bertanggung jawab menginput data dalam aplikasi e-ppbgm. Selain aplikasi ini, ada website Aksi Bangsa Kemendagri untuk pengontrolan 8 aksi Konvergensi pencegahan stunting di kota/kabupaten di Indonesia dan website monitoring Aksi Bangsa Kemendagri oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan daerah. Adanya prasarana ini akan menunjang implementasi dari program, terutama pemusatan aksi konvergensi, dengan demikian akan bisa berjalan sesuai target nasional dan juga berjalan efektif. Prasarana di Kabupaten Blora yang dapat mendukung program konvergensi pencegahan stunting antara lain yaitu ada di FasKes dan Gedung rapat.¹⁷

¹⁷ <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/3727/bupati-terus-upayakan-blora-new-zero-stunting>

b. Kewajiban

1) Satuan Tindakan

a) Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Stunting Aksi Konvergensi adalah instrumen berbentuk aktivitas dalam integrasi intervensi gizi pada konvergensi penanganan penurunan Stunting di 7 Indonesia. Aksi ini tidak berbeda dari Aksi Integrasi. Pelaksananya dengan peningkatan pendekatan penyelenggaraan program dan perilaku antar sektor supaya intervensi gizi bisa dijalankan, ada 8 aksi konvergensi pencegahan stunting yang dilakukan dengan sinergitas dan integrasi bersama antar organisasi perangkat daerah untuk menurunkan stunting. Bappeda dalam hal ini berpengaruh besar mengingat peran yang dimilikinya yaitu sebagai *leading sector* dalam mencapai kesuksesan program. Aksi 1 adalah analisis situasi, lewat rencana pada aksi 2, penurunan stunting bersama-sama antar OPD dengan masyarakat dan sektor non pemerintah terkait lewat rembuk stunting pada aksi 3, Aksi 4 merupakan pembentukan peraturan Bupati/Walikota mengenai Pencegahan Stunting, aksi 5 yakni pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM), sistem manajemen data intervensi pencegahan dan penurunan stunting aksi 6 pengukuran dan publikasi stunting aksi 7, dan review Kinerja Tahunan pada aksi 8.

b) Koordinator antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

Penindaklanjutan terhadap Perpres Nomor 72 Tahun 2021, bahwasanya semua OPD terkait dalam intervensi pencegahan stunting, berkewajiban menjalankan fungsi dan tugasnya untuk menunjang program prevalensi stunting sesuai arahan Wakil Presiden terutama Bappeda Blora sebagai

Leading Sector. Konvergensi pencegahan stunting ini dilaksanakan oleh tim KP2S dengan melakukan koordinasi bersama OPD daerah dimana tim KP2S ini diketuai oleh Kepala Bappeda Blora pada tahun 2020. Akan tetapi, setelah dikeluarkannya Perpres 72 tahun 2021 ada beberapa perubahan yang terdapat dalam regulasi tersebut dimana saat ini Wakil Bupati menjadi Ketua Tim KP2S dan kepala bappeda dan dinas Kesehatan, akan tetapi Bappeda Blora tetap menjadi Leading Sector dalam penanganan ini. Pemerintah daerah juga saat ini sedang menyesuaikan dalam menindaklanjuti Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.¹⁸

- c) Pemberian Dukungan Teknis
- Maksud dari dukungan teknis di sini yaitu OPD yang ditunjuk melakukan semua program dan kegiatan intervensi pada aksi 2, pada pembahasan penyelesaian masalah, apabila langkah perbaikannya disepakati bersifat teknis, maka dinas teknis terkait dan/atau OPD memiliki tanggung jawab menyelesaikan masalah yang ada. Apabila penanganan permasalahannya menyangkut kebijakan, maka Bappeda terkait akan memberi arahan perbaikan dan memperbaiki kebijakan sesuai kebutuhan. Badan perencanaan dalam konteks ini senantiasa aktif memberi dukungan teknis intervensi stunting, pemerintah daerah bersama dinas BKKBN dan dinas kesehatan mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan upaya promotif untuk ibu hamil dan keluarga, sehingga pemahaman pencegahan stunting bisa meningkat. Langkah

¹⁸ <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/3727/bupati-terus-upayakan-blora-new-zero-stunting>

ini dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, RT dan TW, PKK, dan relawan, usaha menurunkan stunting berhubungan dengan program perlindungan sosial, khususnya PKH, selanjutnya pembagian BPNT, serta pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga tidak mampu.

2) Komunikasi

a) Terciptanya Komunikasi yang baik

Adanya komunikasi yang baik akan bisa menyatukan semua pemegang kewenangan, sehingga sinergitas akan tercapai dan kualitas kerja di semua pemegang kewenangan akan meningkat. Pemerintah daerah bersama Bappeda Kabupaten Blora menjalankan fungsi komunikasi ini lewat koordinasi secara bertahap sesuai regulasi.

b) Pembagian Kerja

Dikarenakan banyaknya kegiatan dan program untuk menunjang implementasi konvergensi stunting, maka semua perangkat diharapkan mampu mengambil bagian-bagian, Bappeda Kabupaten Blora saling melakukan koordinasi bersama semua OPD terkait, sehingga bisa menunjang keberhasilan dari program negara terkait percepatan penurunan stunting. Adapun OPD yang terlibat dalam penurunan stunting ini antara lain adalah bappeda sebagai Koordinator pusat, dinsos, dinkes, dinas p2kbp3a, disdik, dinas lingkungan hidup, dinas pertanian, dinas pmd, dinas pu, disdukcapil, bappedalitbang, dinas ketahanan pangan, dan dinas perikanan. Melalui adanya pembagian ini, maka kepala bappeda mengharapkan kerjasama semua perangkat dalam pelaksanaan kegiatan dan program sesuai prosedur dari pemerintah pusat yaitu aksi 1 hingga aksi 8 di Kabupaten Blora.

Bappeda selanjutnya akan bertugas sesuai prosedur dan regulasi yang ada.

Hal ini sejalan hasil wawancara dengan Ibu Nayla selaku kasubdit PPM.

“Peranan Bappeda dalam mengurangi angka stunting di Kabupaten Blora ini cukup banyak. Yaitu ada hak dan kewajiban, contoh hak misalnya kita menggunakan anggaran dari pusat guna mengurangi angka stunting berupa dana APBD dan DAK, membuat data pegawai dan penyuluh di lapangan, menyediakan sarana dan prasarana. Dan untuk yang kewajiban, kita ada satuan tindakan, komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi antar pihak dengan baik dalam penyampaian informasi, dan juga pembagian kerja. Semua itu kita buat guna mengurangi angka stunting di Kabupaten Blora. Kita juga selalu merangkul semua kalangan masyarakat guna mencapai tujuan bersama yaitu angka stunting di Kabupaten Blora ini terus turun hingga mencapai target yaitu turun 14% di tahun 2024”.¹⁹

Dari wawancara disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Bappeda sudah cukup baik dan masih selalu berusaha untuk mengurangi angka stunting di Kabupaten Blora. Tak lupa Bappeda juga melibatkan masyarakat bawah guna mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Blora.

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nayla Selaku Kasubdit Ppm Bappeda Kabupaten Blora, Kamis, 8 Maret 2024, Pukul 14.00 Wib Di Kantor Bappeda Kabupaten Blora.

Gambar 4.5 BAPPEDA Blora Rapat Penurunan Stunting



Sumber: <https://bappeda.blorakab.go.id/>

Kedua, Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

1. Layanan PMT (penambahan makanan tambahan) dan ibu hamil kurang energi kronik (KEK) dan balita kurus.
2. Pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri, layanan ibu hamil kontak minimal 4 kali selama kehamilan (K4), pemberian vitamin A bagi balita (6-59 bulan).
3. Imunisasi dasar lengkap. Pelayanan ibu nifas. Pemberian zinc balita diare. Balita gizi mendapatkan perawatan. ASI eksklusif dan makanan pengganti ASI (MP ASI).
- a. Berikutnya Intervensi Sensitif sektor non-kesehatan berkontribusi 70 persen. Mulai penyediaan sanitasi yang layak. Penyediaan air minum yang layak. Konseling gizi dan bina keluarga balita. Layanan pendidikan anak usia dini (PAUD).
4. Progam perlindungan sosial, JKN/Jamkesda dan PKH. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan anggota Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Ibu Dwi

“Dinas Kesehatan Blora menargetkan Kabupaten Blora itu terbebas dari zero new stunting (tidak

ada kasus baru stunting) di 2024. Jumlah penderita stunting di Kabupaten Blora mengalami penurunan setiap tahun. Saat ini tinggal 9,23 persen dari tahun sebelumnya 13 persen. Setiap tahun angka maupun prosentase stunting di Blora terus turun. Semoga berkat kerja keras lintas sektoral stunting di Blora sudah tidak ada lagi kasus baru di 2024. berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi stunting. Mulai pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, imunisasi lengkap, dan pemberian makanan tambahan.”²⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Blora sudah berusaha menurunkan stunting sesuai dengan bidangnya guna tercapainya target penurunan stunting di Kabupaten Blora.

Gambar 4.6 Dirjen Kesmas Apresiasi Upaya Penurunan Stunting di Kabupaten Blora



Sumber:

<https://blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/3048/dirjen-kesmas-apresiasi-upaya-penurunan-stunting-di-kabupaten-blora>

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Dwi Selaku Anggota Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Kamis, 8 Maret 2024, Pukul 10.00 Wib Di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.

Ketiga, Pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora guna mengurangi angka stunting.

Desa Kembang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Data terbaru pada bulan februari 2024 kasus stunting di Desa Kembang mencapai 10 anak. Hal tersebut mengharuskan masyarakat Desa Kembang saling bekerja sama dengan tujuan menurunkan angka stunting. Kerjasama tersebut juga tidak lepas dari perhatian pemerintah daerah Kabupaten Blora yang senantiasa menggandeng kalangan masyarakat guna menurunkan angka stunting. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kembang adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan dan Penggerakkan Kader Posyandu yang diampingi oleh Bidan Desa
Seorang kader merupakan penggerak utama kegiatan dalam posyandu. Adanya kader sangat penting untuk mencapai tujuan dari posyandu. Pelayanan yang menimbulkan simpati dari masyarakat akan berdampak positif terhadap kepedulian dan partisipasi masyarakat. Kader dapat berperan di kegiatan promotif dan preventif. Selain itu, kader bisa menjadi motivator dan penyuluh masyarakat. Untuk itu, Pengetahuan kader harus baik harus dapat memberikan informasi yang baik dan benar ke masyarakat. Kader setelah diberi pelatihan dapat meningkatkan pengetahuannya sehingga dapat membantu menyebarkan informasi pencegahan stunting kepada masyarakat. Kader harus memiliki bekal dengan ilmu pengetahuan tentang kesehatan yang baik terutama tentang stunting. Dengan adanya pengetahuan yang baik maka kader dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan baik juga. Informasi yang diberikan oleh kader akan sama dengan yang dijelaskan oleh tenaga kesehatan. Hal ini dapat membantu untuk melakukan pencegahan stunting dengan pendekatan langsung ke masyarakat. Sehingga dengan adanya kegiatan pelatihan dan penyegaran kader secara berkala dapat meningkatkan

pengetahuan kader posyandu tentang stunting dan cara pencegahannya.

2. **Pemberian Tambahan makanan**
Memberikan makanan tambahan yang sesuai dengan kebutuhan gizi balita merupakan langkah penting dalam mencegah stunting. Stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam masa seribu hari pertama kehidupan (sejak kehamilan hingga usia dua tahun).

Berikut adalah beberapa contoh makanan tambahan yang dapat membantu mencegah stunting:

1. **Makanan Kaya Protein:** Daging, ikan, telur, dan produk-produk susu merupakan sumber protein yang penting untuk pertumbuhan otot dan jaringan.
2. **Sayuran dan Buah-Buahan:** Kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.
3. **Makanan Sumber Zat Besi:** Kacang-kacangan, biji-bijian, dan daging merah adalah sumber zat besi yang dapat membantu mencegah anemia.
4. **Makanan Sumber Kalsium:** Produk susu, seperti susu, keju, dan yoghurt, membantu perkembangan tulang dan gigi yang sehat.
5. **Makanan Kaya Lemak Sehat:** Lemak sehat, seperti yang ditemukan dalam alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun, penting untuk perkembangan otak.

Dari wawancara dengan Ibu Wiwin Kader Posyandu Desa Kembang adalah sebagai berikut:

“Kegiatan posyandu diadakan 1 bulan 1 kali yaitu di hari sabtu tepatnya di Balaidesa Desa Kembang. Jumlah anak yang mengikuti posyandu yaitu 83 anak. Kader-kader posyandu juga pernah ikut kegiatan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh KPPS. Kegiatan tersebut salah satunya dengan diberikan pemahaman mengenai stunting serta bagaimana cara pencegahan dan mengatasinya. Tidak lupa juga kita diberikan pelatihan untuk kegiatan Posyandu. Untuk tambahan makanan yang dibagikan saat kegiatan

posyandu sendiri kita berdiskusi dengan Bidan Desa yaitu Ibu Endah yang merupakan Bidan Desa di Desa Kembang.”²¹

Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat khususnya Desa Kembang dalam mengurangi angka stunting yaitu dengan penguatan kader posyandu serta mengikuti pelatihan posyandu. Masyarakat juga merasakan dampak baik dari usaha BAPPEDA dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Blora dalam mengurangi angka stunting. Namun masih ada masyarakat yang belum mengetahui bahwa anaknya terkena stunting. Dari wawancara dengan Ibu Endah selaku Bidan Desa di Desa Kembang adalah sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya BAPPEDA dan Dinas Kesehatan jujur itu sangat membantu dan saya pun selaku Bidan di Desa Kembang dapat merasakan dampak baiknya seperti kasus stunting bisa menurun walaupun sedikit demi sedikit itu sudah membuat saya senang dan bersyukur. Untuk program-program yang dilakukan oleh BAPPEDA Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Blora menurut saya sudah cukup baik. Tapi mungkin kesadaran masyarakat mengenai stunting ini masih kurang. Serta ada sebagian masyarakat yang belum menyadari bahwa anaknya mengalami stunting. Mungkin harus lebih sering diadakan sosialisasi untuk masyarakat mengenai stunting. Untuk kedepannya semoga kasus stunting di Kabupaten Blora khususnya di Desa Kembang ini segera bisa tertatasi.”²²

²¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Wiwin Selaku Kader Posyandu Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, Kamis, 7 Maret 2024, Pukul 10.00 Wib Di Desa Kembang

²² Hasil Wawancara Dengan Ibu Endah Selaku Bidan Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, Kamis, 7 Maret 2024, Pukul 09.00 Wib Di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Di Balai Desa Kembang

Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Menurut Ibu Endah adanya peran BAPPEDA dan Dinas Kesehatan Kabupaten Blera dalam upaya mengurangi angka stunting di Kabupaten Blera sudah cukup baik dan sangat membantu. Tetapi kurangnya kesadaran masyarakat akan kasus stunting ini masih menjadi penghambat dalam mengurangi angka stunting. Kedepannya Ibu Endah berharap agar lebih sering diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kasus stunting supaya kasus stunting segera berkurang khususnya di Desa Kembang.

Gambar 4.7 Kegiatan Posyandu di Desa Kembang



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti Tahun 2023

Hasil dari pemberdayaan kolaboratif antara Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Blera dalam mengurangi angka stunting di tahun 2022-2023 yaitu kasus stunting di Kabupaten Blera menurut SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) menurun dari 25,8% di tahun 2022 menjadi 21,2% di tahun 2023.²³

²³

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/blora-optimistis-prevalensi-stunting-turun-jadi-14-persen/>

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Kolaboratif Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam Mengurangi Angka Stunting di Tahun 2022-2023

a. Faktor Pendukung

1) Faktor pendukung BAPPEDA

Dari program yang dilaksanakan oleh Bappededa adalah dengan adanya anggaran untuk program tersebut. Anggaran tersebut berasal dari dana dana APBD dan DAK. Faktor pendorong program penanggulangan stunting adalah dengan melibatkan berbagai macam dana yang ada seperti dana desa dan bantuan dari Baznas serta anggaran pendapatan dan belanja desa. Dana desa dan bantuan dari Baznas digunakan untuk program makanan tambahan dengan tujuan guna memastikan asupan gizi untuk balita yang beresiko stunting. Sedangkan, anggaran pendapatan dan belanja digunakan untuk program-program umum dari pemerintah pusat seperti intervensi Kesehatan dan pembiayaan kegiatan Pendidikan.²⁴

2) Faktor Pendukung Dinas Kesehatan

Faktor pendukung dari Dinas Kesehatan adalah sumber daya manusia yang juga menjadi faktor pendukung dalam pemberdayaan ini. Kolaborasi dan optimalisasi sumber daya menjadi fokus utama. Langkah nyata berupa mengantarkan makanan tambahan secara langsung ke rumah-rumah warga yang terkena dampak stunting menjadi komitmen nyata antara pemerintah Kabupaten Blora dengan warga setempat. selain itu, hal ini juga berdampak pada dukungan personal dan juga pencitaan keterjangkauan layanan untuk mengatasi stunting. Faktor pendukung lainnya adalah koordinasi yang baik dari berbagai pihak baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat setempat. Koordinasi yang berjalan dengan baik antara aparatur kelurahan,

²⁴ Agus Bahrudin And Mayang, "Analisis Implementasi Program Rumah Desa Sehat Dalam Penurunan Angka Stunting (Studi Kasus Di Desa Margomulyo Kabupaten Kendal)," *Jurnal Mimbar Administrasi* 21, No. 1 (2024).

puskesmas, dan kelompok kerja yang bertugas untuk menangani dan mencegah stunting, menjadikan program penurunan stunting berjalan lebih efektif dan efisien.²⁵

- 3) Faktor pendukung dari Masyarakat Desa Kembang
 - Kinerja kader posyandu, peranan kader posyandu yang cukup efektif akan mendorong peningkatan kesuksesan program yang dilaksanakan. Lawrence Green terdapat beberapa indikator untuk melihat peran-peran dan keberhasilan para kader posyandu. Faktor pertama ialah *Predisposing factor* atau faktor yang mendorong seseorang untuk mengambil tindakan di mana kader posyandu melakukan sosialisasi pencegahan stunting kepada masyarakat, memberikan makanan tambahan dan pemberian vitamin pada ibu hamil dan balita. Dengan target adanya perubahan perilaku dan kebiasaan ibu yang berdampak baik bagi kesehatan anak. Faktor kedua ialah *Enabling factor* (faktor pemungkin), yaitu peran kader dalam pencegahan stunting didorong dengan adanya akses pelayanan ke posyandu dan fasilitas yang tersedia untuk pelayanan posyandu. Selanjutnya, pada faktor terakhir *Reinforcing factor* (faktor penguat), yaitu dukungan pemerintah, dukungan ibu balita, dan dukungan petugas kesehatan terhadap kegiatan posyandu dalam pencegahan stunting yang berkontribusi menyukseskan kader posyandu dalam menjalankan perannya.²⁶

b. Faktor Penghambat

- 1) Hambatan BAPPEDA dalam mengurangi angka stunting di Kabupaten Blora
 1. Adanya *refocusing* anggaran
Terjadinya *refocusing* anggaran besar-besaran akibat adanya pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap seluruh pelaksanaan

²⁵ Mochamad Hanifan Muchtar And Ana Chaerunisyah, “Analisis Kinerja Kelompok Kerja Iv Pemberdayaan Stunting Di Kelurahan Semanan Jakarta Barat”, No. 1 (2023): 53–60.

²⁶ Faizah, Ismail, And Kurniasari, “Peran Kader Posyandu Dalam Penurunan Angka Stunting.”

birokrasi pemerintahan, seluruh pemerintahan daerah harus memutar otak untuk pengefisiensi anggaran atas program dan kegiatan yang akan dijalankan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan arah kebijakan keuangan terbaru dengan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Hal itu membuat OPD terkait tidak maksimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam upaya konvergensi stunting yang ingin diwujudkan oleh pemerintah.

2. Kurangnya koordinasi dalam penyampaian informasi dan data

Pengelolaan informasi dan data dalam pelaksanaan koordinasi konvergensi stunting di kabupaten Gunung Mas di nilai sudah cukup baik, hanya saja ada Sebagian OPD tertentu yang masih terlambat dalam memberikan data dan informasi kepada Bappedalitbang. Salah satunya adalah keterlambatan pada pelaksanaan program 8 aksi terdapat OPD terkait yang terlambat bahkan tidak mengikuti kegiatan tersebut, sehingga hal ini mempersulit OPD-OPD yang telah hadir yang membutuhkan data dan informasi dari OPD tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan Ibu Nayla selaku kasubdit PPM.

“Ada beberapa kekurangan yang terjadi pada saat pelaksanaannya, dari dua dimensi yang ada terdapat satu hambatan di setiap dimensi/indikator tersebut, diantaranya pada Dimensi Hak di bagian Dimensi Anggaran yang tersedia dan Dimensi Kewajiban di bagian Komunikasi. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Peranan Bappeda dalam koordinasi konvergensi pencegahan Stunting diantaranya, anggaran yang

tersedia masih belum kurang optimal akibat adanya refocusing anggaran akibat pengalihan anggaran untuk program penanganan covid-19 dan kurangnya koordinasi antar pihak dengan baik dalam penyampaian data dan informasi akibat banyaknya rolling jabatan.”²⁷

2) Hambatan Dinas Kesehatan dalam mengurangi angka stunting di Kabupaten Blora

1. Kurangnya Kesadaran dari Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan, pemenuhan gizi yang baik, serta kurangnya pengetahuan orang tua mengenai stunting menjadi penghambat dinas kesehatan untuk mengurangi angka stunting di Kabupaten Blora.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan termasuk kondisi air dan sanitasi yang buruk, hingga pencemaran berkontribusi terbesar kedua terhadap angka *stunting*, yakni 21,7 % setelah faktor dari kesehatan ibu saat hamil. Saat pandemi Covid-19 ini tingkat kemiskinan meningkat, sehingga banyak keluarga yang tak dapat mengoptimalkan pemicu stunting tersebut. Selama pandemi orang mengeluh makanan, termasuk makanan yang layak bergizi dan berprotein tinggi. Lalu belum juga sanitasinya apakah sudah layak. Dengan begitu sangat jelas bahwa orang yang tinggal di lingkungan kumuh dengan tingkat lingkungan yang tercemar akan sering kali sakit, ibu hamil sakit, hingga anaknya bisa stunting.

3. Faktor Sosial Budaya

Salah satu faktor yang mempengaruhi status kesehatan termasuk pemenuhan gizi keluarga adalah sosial budaya. Sikap dipengaruhi oleh

²⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nayla Selaku Kasubdit Ppm Bappeda Kabupaten Blora, Kamis, 8 Maret 2024, Pukul 14.00 Wib Di Kantor Bappeda Kabupaten Blora.

budaya dalam suatu etnis yang dapat mempengaruhi perilaku suatu individu. Faktor sosial budaya dari orangtua dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam keluarga yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Suatu suku akan mempunyai keyakinan, kebiasaan, maupun budaya yang selalu dilakukan pada kehidupan sehari-hari yang dapat berdampak pada masalah kesehatan, dari segi pemberian nutrisi dan gizi seperti jarang makan daging, sayur karena dari kecil tidak dibiasakan oleh ibu. Hal-hal tersebut dapat terjadi karena bermula dari kebiasaan individu didalam kelompok yang dilihat dari etnis atau asal tempat tinggal yang kemudian kebiasaan, budaya, dan kepercayaan tersebut akan berlanjut sampai generasi berikutnya.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan Ibu Dwi anggota Dinas Kesehatan Blora

“Upaya-upaya kita dalam mengurangi angka stunting di Kabupaten Blora ini tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang ada dari mulai faktor kesadaran masyarakat, faktor sosial budaya, dan juga faktor lingkungan. Faktor-faktor itulah yang selama ini menjadi hambatan kita semua khususnya dinas kesehatan untuk mengurangi angka stunting di Kabupaten Blora. Jadi satu persatu permasalahan itu harus diatasi.”

3) Hambatan yang dialami oleh Masyarakat Desa Kembang

Sama halnya dengan tim pendampingan, kader posyandu juga mengalami permasalahan dari sisi internal dan eksternal. Dimulai dari jarak antar kampung atau dusun yang cukup jauh sehingga membuat para kader sulit untuk menjangkau semua balita dan ibu hamil yang ada. Selanjutnya, ada minimnya sarana dan prasarana. Lalu ada

penyampaian materi yang kurang efektif yang mana ini terjadi karena kader masih memiliki pengetahuan rendah dan yang terakhir adalah pendanaan desa untuk operasional pencegahan stunting yang tidak tepat waktu.

D. Pembahasan

1. Analisis Pemberdayaan Kolaboratif Antara Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam Mengurangi Angka Stunting di Tahun 2022-2023

Berdasarkan teori pemberdayaan kolaboratif, pemberdayaan kolaboratif didasarkan pada konsep kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan kolaboratif memanfaatkan karakteristik kolaborasi untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Pemberdayaan kolaboratif dapat didefinisikan sebagai pemberdayaan yang dilakukan dengan cara kerjasama antara dua atau lebih pihak dengan tujuan mengatasi suatu permasalahan atau pekerjaan.

Dalam menyelesaikan masalah stunting ini, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat perlu dilakukan. Karena masalah stunting merupakan masalah bersama dan juga termasuk dalam masalah sensitive bagi para ibu yang memiliki anak mengalami stunting. Sehingga peran masyarakat juga diperlukan disini.

Di Kabupaten Blora sendiri, sudah ada pemberdayaan kolaboratif antara pemerintah dengan masyarakat Kabupaten Blora. Program kolaboratif tersebut adalah berupa kegiatan rembug stunting tingkat Kabupaten Blora Program ini sudah berjalan pada tahun 2022 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora yang dihadiri 656 peserta terdiri dari unsur Pimpinan Daerah, OPD, Puskesmas, Ketua TPPS Kecamatan, Ketua TPPS Desa/Kelurahan. Di tingkat Kecamatan, Rembug Stunting di tingkat Kecamatan diadakan di 16 kecamatan yang ada di Blora, dan Rembug Stunting tingkat Desa/Kelurahan diadakan di 104 Desa/Kelurahan. Di tingkat Desa/Kelurahan dilakukan pembinaan dengan

pembentukan tim khusus yakni pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

Bappeda juga berkolaborasi dengan ODP terkait guna mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Blora. ODP (Organisasi Perangkat Daerah) yang berkolaborasi dengan Bappeda antara lain yaitu Koordinator pusat, dinkes, dinsos, disdik, dinas p2kbp3a, dinas pertanian, dinas lingkungan hidup, dinas pu, dinas pmd, bappedalitbang, disdukcapil, dinas perikanan, dan dinas ketahanan pangan. Kolaborasi ini terkait dengan pembagian kerja antara bappeda dengan ODP. Hal ini dikarenakan banyaknya program dan kegiatan yang sudah dirancang dengan tujuan mempercepat penurunan stunting. Pelaksanaan program yang telah disusun pemerintah harapannya bisa dilaksanakan sesuai dengan prosesur dari aksi 1 sampai dengan aksi 8. Dimana urutan aksinya antara lain yaitu melakukan analisis situasi, membuat dan melaksanakan rencana kegiatan, melakukan program penurunan stunting secara bersama-sama dengan ODP terkait dengan sektor non-pemerintah melalui rebug stunting, melakukan pembinaan terhadap Kader Pembangunan Manusia (KPM), memanfaatkan sistem manajemen data untuk intervensi pencegahan dan penurunan stunting, melakukan pengukuran dan publikasi stunting, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi kinerja tahunan.

Dinas Kesehatan dan dinas BKKBN berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yakni penurunan angka stunting. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan edukasi berupa sosialisasi untuk ibu-ibu hamil dan keluarga mengenai pencegahan stunting dan ikut melibatkan tokoh-tokoh masyarakat seperti RT, RW, PKK, dan tokoh agama setempat. Pendampingan keluarga guna penurunan angka stunting di Kabupaten Blora dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain yaitu mengidentifikasi faktor resiko stunting, melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan, memfasilitasi bantuan sosial, dan memberikan pelayanan

lainnya. Masyarakat yang menjadi sasaran dalam program ini adalah calon pengantin, ibu hamil, pasca salin, dan bayi dua tahun.²⁸

Suksesnya program penurunan stunting tidak bisa lepas dengan adanya peranan kader posyandu. Peningkatan pengetahuan kader posyandu sangat diperlukan dengan cara memberikan penyuluhan mengenai pencegahan stunting. Dengan harapan, adanya peningkatan kader posyandu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya stunting dan cara pencegahan stunting.²⁹

Hasil dari pemberdayaan kolaboratif Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Blora dalam mengurangi angka stunting di tahun 2022-2023 yaitu kasus stunting di Kabupaten Blora menurut SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) menurun dari 25,8% di tahun 2022 menjadi 21,2% di tahun 2023.³⁰

2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Kolaboratif Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Blora dalam Mengurangi Angka Stunting di Tahun 2022-2023

Dari pelaksanaan sebuah pemberdayaan pasti ada faktor yang mendorong dan menghambat. Faktor pendukung dari program yang dilaksanakan oleh Bappeda adalah dengan adanya anggaran untuk program tersebut. Anggaran tersebut berasal dari dana dana APBD dan DAK. Faktor pendorong program penanggulangan stunting adalah dengan melibatkan berbagai macam dana yang ada seperti dana desa dan bantuan dari Baznas serta anggaran pendapatan dan belanja desa. Dana desa dan

²⁸ Aris Toening Winarni, "Memutus Mata Rantai Stunting: Transformasi Pendampingan Keluarga Oleh Tim Stunting Kecamatan Kunduran Blora," *Public Service And Governance Journal* 5, No. 1 (2024): 291-309, <https://doi.org/10.56444/Psgj.V5i1.1355>.

²⁹ Ria Nur Faizah, Iraini Ismail, And Netty Dyah Kurniasari, "Peran Kader Posyandu Dalam Penurunan Angka Stunting," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, No. 1 (2023): 87-96, <https://doi.org/10.47467/As.V6i1.5738>.

³⁰ <https://jatengprov.go.id/Beritadaerah/Blora-Optimistis-Prevalensi-Stunting-Turun-Jadi-14-Persen/>

bantuan dari Baznas digunakan untuk program makanan tambahan dengan tujuan guna memastikan asumpsi gizi untuk balita yang beresiko stunting. Sedangkan, anggaran pendapatan dan belanja digunakan untuk program-program umum dari pemerintah pusat seperti intervensi Kesehatan dan pembiayaan kegiatan Pendidikan.³¹

Faktor pendukung dari Dinas Kesehatan adalah sumber daya manusia yang juga menjadi faktor pendukung dalam pemberdayaan ini. Kolaborasi dan optimalisasi sumber daya menjadi fokus utama. Langkah nyata berupa mengantarkan makanan tambahan secara langsung ke rumah-rumah warga yang terkena dampak stunting menjadi komitmen nyata antara pemerintah Kabupaten Blora dengan warga setempat. Selain itu, hal ini juga berdampak pada dukungan personal dan juga penciptaan keterjangkauan layanan untuk mengatasi stunting. Faktor pendukung lainnya adalah koordinasi yang baik dari berbagai pihak baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat setempat. Koordinasi yang berjalan dengan baik antara aparatur kelurahan, puskesmas, dan kelompok kerja yang bertugas untuk menangani dan mencegah stunting, menjadikan program penurunan stunting berjalan lebih efektif dan efisien.³²

Faktor pendukung lainnya adalah berasal dari Masyarakat Desa Kembang adalah kinerja kader posyandu. Peranan kader posyandu yang cukup efektif akan mendorong peningkatan kesuksesan program yang dilaksanakan. Lawrence Green terdapat beberapa indikator untuk melihat peran-peran dan keberhasilan para kader posyandu. Faktor pertama ialah *Predisposing factor* atau faktor yang mendorong seseorang untuk mengambil tindakan di mana kader posyandu melakukan sosialisasi pencegahan stunting kepada masyarakat, memberikan makanan tambahan dan pemberian vitamin pada ibu hamil

³¹ Agus Bahrudin And Mayang, "Analisis Implementasi Program Rumah Desa Sehat Dalam Penurunan Angka Stunting (Studi Kasus Di Desa Margomulyo Kabupaten Kendal)," *Jurnal Mimbar Administrasi* 21, No. 1 (2024).

³² Mochamad Hanifan Muchtar And Ana Chaerunisyah, "Analisis Kinerja Kelompok Kerja Iv Pemberdayaan Stunting Di Kelurahan Semanan Jakarta Barat", No. 1 (2023): 53–60.

dan balita. Dengan target adanya perubahan perilaku dan kebiasaan ibu yang berdampak baik bagi kesehatan anak. Faktor kedua ialah *Enabling factor* (faktor pemungkin), yaitu peran kader dalam pencegahan stunting didorong dengan adanya akses pelayanan ke posyandu dan fasilitas yang tersedia untuk pelayanan posyandu. Selanjutnya, pada faktor terakhir *Reinforcing factor* (faktor penguat), yaitu dukungan pemerintah, dukungan ibu balita, dan dukungan petugas kesehatan terhadap kegiatan posyandu dalam pencegahan stunting yang berkontribusi menyukseskan kader posyandu dalam menjalankan perannya.³³

Selain dari faktor-faktor pendorong, dalam pelaksanaan program juga terdapat faktor penghambat. Pihak yang menjalankan program pemberdayaan Masyarakat dalam penurunan stunting Kabupaten Blora memiliki faktor yang menghambat kinerjanya. Pihak tersebut masing-masing memiliki kendala tersendiri. Bappeda mengalami kendala pada anggaran dan koordinasi pada petugas-petugas yang sudah dilakukan pembagaian kerja. Pada aspek anggaran terjadi *refocusing* anggaran yang dilakukan secara besar-besaran dikarenakan pandemi covid 19. Adanya peraturan dari pemerintah pusat, dimana menyatakan bahwa Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya. Dengan ini mengakibatkan OPD tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal dalam mengupayakan konvergensi stunting yang sudah ditargetkan oleh pemerintah.

Selanjutnya adalah kurangnya koordinasi dalam menyampaikan informasi dan data. Pengelolaan informasi dan data dalam pelaksanaan koordinasi konvergensi stunting di kabupaten Gunung Mas di nilai sudah cukup baik, hanya saja ada Sebagian OPD tertentu yang masih terlambat dalam memberikan data dan informasi kepada Bappedalitbang. Salah satunya adalah keterlambatan pada

³³ Faizah, Ismail, And Kurniasari, "Peran Kader Posyandu Dalam Penurunan Angka Stunting."

pelaksanaan program 8 aksi terdapat OPD terkait yang terlambat bahkan tidak mengikuti kegiatan tersebut, sehingga hal ini mempersulit OPD-OPD yang telah hadir yang membutuhkan data dan informasi dari OPD tersebut.

Pihak selanjutnya yang mengalami hambatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Hambatan yang dialami berupa masyarakat yang kurang menyadari mengenai permasalahan stunting. Masyarakat masih memiliki kesadaran yang cukup rendah mengenai aspek Kesehatan dan pemenuhan gizi yang baik. Selain itu, orang tua yang masih kurang faham mengenai stunting menjadi penghambat Dinas Kesehatan Kabupaten Blora untuk menjalankan tugasnya yakni melakukan penurunan stunting di Kabupaten Blora. Kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan menjadi faktor yang memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap permasalahan stunting. Faktor ini berupa kondisi air, sanitasi yang buruk, dan pencemaran. Dan yang terakhir adalah faktor sosial budaya. Sikap dipengaruhi oleh budaya dalam suatu etnis yang dapat mempengaruhi perilaku suatu individu. Faktor sosial budaya dari orangtua dapat mempengaruhi dalam pengambilan Keputusan dalam keluarga yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

Faktor penghambat juga datang dari sisi internal dan eksternal tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.³⁴ Dari sisi internal seperti pengetahuan dari para anggota petugas itu sendiri yang dirasa masih butuh peningkatan khususnya mengenai kasus stunting baik dari sisi penyebab maupun dampak. Sedangkan, dari sisi eksternal seperti faktor ekonomi yang menyebabkan seorang balita bisa terkena stunting. Perlu adanya peningkatan kesejahteraan seperti pelatihan dan pemberdayaan lebih lanjut kepada keluarga yang diduga memiliki balita stunting agar ke depannya bisa lebih produktif dalam menunjang ekonominya sendiri tanpa harus bergantung kepada bantuan-bantuan yang datang. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dimana

³⁴ Muchtar And Chaerunisyah, "Analisis Kinerja Kelompok Kerja Iv Pemberdayaan Stunting Di Kelurahan Semanan Jakarta Barat Tahun."

peran pendamping keluarga dalam upaya penurunan stunting di Kecamatan Kunduran masih menghadapi sejumlah kendala seperti kurangnya kompetensi pendamping, metode penyuluhan yang kurang efektif, hambatan akses fasilitas kesehatan bagi keluarga stunting, serta belum optimalnya deteksi dini dan suplementasi ibu hamil berisiko stunting.

Diperlukan transformasi paradigma pendampingan stunting dari pendekatan lama yang bersifat top-down menuju model dialogis dan kolaboratif antara pendamping dan keluarga. Transformasi diperlukan pada berbagai aspek seperti peningkatan kompetensi pendamping, penyuluhan yang interaktif, sistem rujukan terorganisir, deteksi dini risiko stunting ibu hamil, serta peningkatan akses suplementasi gizi bagi ibu hamil berisiko. Dengan transformasi penguatan peran pendamping keluarga stunting yang komprehensif, diharapkan intervensi stunting menjadi lebih efektif dalam mencapai target penurunan stunting di Kecamatan Kunduran dan Kabupaten Blora.

Kader posyandu juga mengalami hambatan dalam pelaksanaan programnya.³⁵ Sama halnya dengan tim pendampingan, kader posyandu juga mengalami permasalahan dari sisi internal dan eksternal. Dimulai dari jarak antar kampung atau dusun yang cukup jauh sehingga membuat para kader sulit untuk menjangkau semua balita dan ibu hamil yang ada. Selanjutnya, ada minimnya sarana dan prasarana. Lalu ada penyampaian materi yang kurang efektif yang mana ini terjadi karena kader masih memiliki pengetahuan rendah dan yang terakhir adalah pendanaan desa untuk operasional pencegahan stunting yang tidak tepat waktu.

³⁵ Faizah, Ismail, And Kurniasari, "Peran Kader Posyandu Dalam Penurunan Angka Stunting."